



## Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo)

Fara Dita<sup>1</sup>, Niswatin<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo  
Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Tengah, Gorontalo 96127, Indonesia

---

### Article history:

Received: 2022-05-21

Revised: 2022-05-23

Accepted: 2022-05-24

---

✉ Corresponding Author:

**Fara Dita:** Tel. 082393551040/082292833641 (WA)

E-mail: [faraditaamanto@gmail.com](mailto:faraditaamanto@gmail.com)/[faraditaarumanto@gmail.com](mailto:faraditaarumanto@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to determine the use of Information Technology and Internal Control Systems to influence the Management of Village Fund Allocation in the Boliyohuto District in the Local Government of Gorontalo. This research used a quantitative method by collecting data using a questionnaire survey. The respondents were 52 participants, including the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and Village Consultative Department. The data were analyzed using a statistical t-test, f statistic test, and coefficient of determination (R Square) test by IBM SPSS 16 for windows. It shows that the use of Information Technology has a partial effect of 58.9% and the Internal Control System result was 58.5%. In addition, the simultaneous use of Information Technology and Internal Control Systems has a positive and significant effect on the Management of Village Fund Allocations of 56.4% as the determinant value. Meanwhile, the remaining 43.6% were other variables that have not examined in this study.*

*Keywords: Information Technology; Internal Control; Village Fund.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan survey kuesioner. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 52 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan uji t statistik, uji f statistik, dan uji koefisien determinasi (*R Square*) dengan menggunakan *IBM SPSS 16 for windows*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial senilai 58.9%, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial sebesar 58.5%. kemudian secara simultan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan

nilai determinan sebesar 56.4% sedangkan sisanya sebesar 43.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Teknologi Informasi; Pengendalian Internal; Dana Desa**

## 1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Peraturan menteri desa nomor 06 tahun 2020 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya di perlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Salah satu penerimaan Desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau di sebut dengan ADD. Sumarni, (2020) Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan bahwa salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan itu adalah hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Beliau pun menambahkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Adapun pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.



**Gambar 1. Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Grontalo Tahun 2016-2021**

Melihat besarnya jumlah nominal terhadap alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat yang begitu besar dari enam tahun terakhir kepada desa namun tidak dikelola secara maksimal dan tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut tidak dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat melalui beberapa media yang diperlukan. Demikian pula keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dana alokasi tersebut tidak dilibatkan secara langsung sehingga pengelolaan dana desa tersebut masih perlu dioptimalkan sebagaimana wawancara survey awal pada Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (KASI PMD) kecamatan yaitu bapak Rano S. Rahmola (2021). Beliau pun juga menambahkan bahwa keterlambatan pencairan dana dari pusat diakibatkan oleh laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sering mengalami keterlambatan akibat sumber daya manusia yang dimiliki setiap desa masih rendah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi masih belum dikuasai sepenuhnya dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa belum dikelola secara optimal dan pertanggungjawaban pada setiap penggunaan alokasi dana desa masih rendah serta tidak mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan dana desa sehingga pemerintah Desa belum mampu untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

Permasalahan tersebut juga telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya Karyadi, (2019) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa belum mampu memberikan kemajuan kepada masyarakat walaupun anggaran yang dialokasikan setiap tahun mengalami peningkatan. Demikian pula, penelitian lain oleh Yustika (2019) mengungkap fenomena dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa yang melewati batas *cut off* 31 Desember tahun

anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebagaimana peneliti telah merangkum beberapa penelitian terdahulu, namun peneliti belum menemukan pengaruh secara langsung antara pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan memformulasikan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Alokasi Dana Desa. Demikian pula, variabel yang digunakan peneliti khususnya pemanfaatan teknologi informasi peneliti mengambil dimensi (1) komputer dengan indikator *hardware dan software*, (2) jaringan dengan indikator *network*, dan (3) informasi dengan indikator *manusia/people*. Sementara penelitian terdahulu mengambil komputer, jaringan, dan informasi sebagai indikator.

## 2. Kajian Teoritis Dan Hipotesis

### Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Sumarni, (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan juga yaitu melibatkan masyarakat. Hal tersebut karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pengukuran Pengelolaan Dana Desa

#### a) Transparansi

Menurut Kusuma, (2019) Transparansi atau keterbukaan di dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan adalah bagaimana upaya pemerintah untuk bersifat terbuka mengenai segala informasi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Transparansi juga merupakan satu aspek dasar yang bertujuan mewujudkan penyelenggara pemerintahan yg baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi warga perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses dan keterlibatan rakyat pada proses aplikasi penyelenggaraan pemerintah guna menyampaikan imbas perwujudan aneka macam indikator lainnya.

Menurut Purwanti, (2021) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- 1) Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen,
- 2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, dan
- 3) Adanya keterbukaan proses kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

#### b) Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas, kegiatan serta pelaporan dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Sujarweni, (2016). Akuntabilitas juga merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Yang pada dasarnya Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran saja akan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Indraswari & Rahayu, (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerja, tindakan ataupun terhadap keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.

Menurut LAN dan BPKP, (2002) terdapat beberapa indikator yang terdapat pada dimensi akuntabilitas ini, antara lain:

- 1) Kejujuran dan Hukum,

- 2) Managerial,
  - 3) Program, dan
  - 4) Kebijakan.
- c) Partisipatif

Partisipatif menurut Rahmah et al., (2021) adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dan evaluasi. Keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa serta perencanaan pembangunan desa pula dapat dipengaruhi oleh komponen partisipasi didalamnya.

Indraswari & Rahayu, (2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa peran penting partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu sebagai berikut (1) Partisipasi masyarakat dapat menjadi wadah guna mendapatkan informasi tentang kebutuhan, kondisi dan respon masyarakat setempat perihal program pembangunan, (2) Keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan dapat membangun rasa kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah guna mengelola program tersebut dan, (3) Membentuk hak demokrasi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat guna mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yg serasi.

Indikator partisipasi menurut Salle, (2019) mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Akses bagi partisipasi dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran,
- 2) Peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen, dan
- 3) Sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Suhendro, (2020) menyatakan bahwa Teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermanfaat. Komputer juga bisa dikatakan sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi yang merupakan alat yang mampu melipatgandakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan mampu mengerjakan sesuatu yang pada dasarnya manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Adapun menurut Indraswari & Rahayu, (2021) manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi ini antara lain seperti (1) Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan lebih akurat, (2) Teknologi Informasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi untuk penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah, dan (3) Teknologi Informasi dapat menjadi pengembang keterampilan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kurikulum. Sehingga teknologi informasi ini sangat berperan penting dalam proses pengelolaan dana desa ini.

### **Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi**

#### a) Komputer

Koisin & Melania Lalamafu, (2021) Komputer adalah suatu memproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan oprasilogika, tanpa campur tangan manusia mengoperasikan selama pemrosesan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang menerima dan memproses data dalam bentuk sebuah informasi, dengan cepat serta dapat memanipulasi data dan sistem penghitung yang cepat dan juga tepat.

Adapun indikator dari dimensi komputer ini antara lain menurut (Utami, 2020):

- a) *Hardware* (Perangkat Keras), dan
- b) *Software* (Perangkat Lunak).

#### b) Jaringan

Menurut Rahman, Baidhowi, & Agnesia, (2018), jaringan merupakan gabungan kata net dan work, sehingga menjadi network, yang penekanannya terletak pada kerja jaringan, dimengerti sebagai kerja dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring (net). Jaringan itu diumpamakan seperti jaring laba-laba yang saling mengikat antara simpul satu dengan simpul lainnya.

Adapun indikator dari dimensi jaringan ini yaitu *Network* (Fasilitas jaringan dan komunikasi) Sebuah sistem yang terhubung untuk menunjang adanya pemakaian bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda.

#### c) Informasi

Menurut Burhanuddin, (2021) Ketersediaan informasi pelayanan publik yang selalu terbaru dan transparan merupakan kebutuhan mutlak diperlukan. Pelayanan kepada masyarakat berupa informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap. Fungsi sesungguhnya informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem komunikasi disuatu lembaga atau organisasi. Informasi yang berkualitas membutuhkan data yang tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada ketersediaan data pada

waktu yang diperlukan untuk dapat digunakan dalam kebutuhan tertentu. Informasi yang berkualitas berasal dari data yang dapat diolah dan dihasilkan secara cepat dan tepat agar pemanfaatannya tepat.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Menurut COSO, Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu kegiatan yang dipengaruhi manajemen, dewan komisaris atau perorangan, yang disusun untuk memperoleh keyakinan yang kuat. Keyakinan tersebut dapat tercapai melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta operasional yang efisien dan juga efektivitas. Berdasarkan pengertian pengendalian tersebut, COSO menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu serta bukan untuk mencapai tujuan itu sendiri.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawainya guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pengendalian intern ini pun antara lain: (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan aset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, dan (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **Pengukuran Sistem Pengendalian Intern**

#### a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan komponen yang terpenting dikarenakan dapat membentuk budaya dan perilaku manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian. Dalam PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif guna penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam lingkungan kerjanya, melalui: (a) penegakan integritas (kejujuran) dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) kepemimpinan yang kondusif, (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan, (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait (Pitaloka, Widayanti, Savitri, Motohar, & Kabib, 2020).

Adapun indikator yang dapat diturunkan dari penjelasan di atas Menurut PP No. 60 Tahun 2008 antara lain:

- 1) Kepemimpinan yang kondusif,
- 2) Struktur Organisasi, dan
- 3) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

#### b) Penilaian Resiko

Menurut PP No. 60 tahun 2008 juga dijelaskan bahwa Pengendalian intern harus memberikan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi pemerintah daerah. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik di tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Pimpinan instansi pemerintah atau evaluator harus berkonsentrasi pada penetapan tujuan instansi, pengidentifikasian dan analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat perubahan.

Adapun indikator dari dimensi penilaian resiko menurut PP No. 60 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Identifikasi risiko, dan
  - 2) Analisis Resiko,
- #### c) Kegiatan Pengendalian

Menurut PP No. 60 tahun 2008 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri dari reviu atas kinerja instansi yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian atas aset, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut PP 60 No. 60 tahun 2008, Pasal indikator dari dimensi Kegiatan pengendalian antara lain:

- 1) Otorisasi transaksi dan kejadian penting, dan
  - 2) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
- d) Informasi Dan Komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa ekstern dan intern. Informasi tersebut harus dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan yang memerlukannya dalam kerangka waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab sosial. Informasi dan Komunikasi juga merupakan komponen penghubung antara komponen satu dengan yang lainnya, sehingga semua komponen tersebut memiliki hubungan yang integral. Untuk terciptanya komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus dengan sekurang-kurangnya: (1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dari sarana komunikasi, dan (2) mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus (Pitaloka et al., 2020).

Indikator dari dimensi informasi dan komunikasi menurut PP nomor 60 tahun 2008, yaitu:

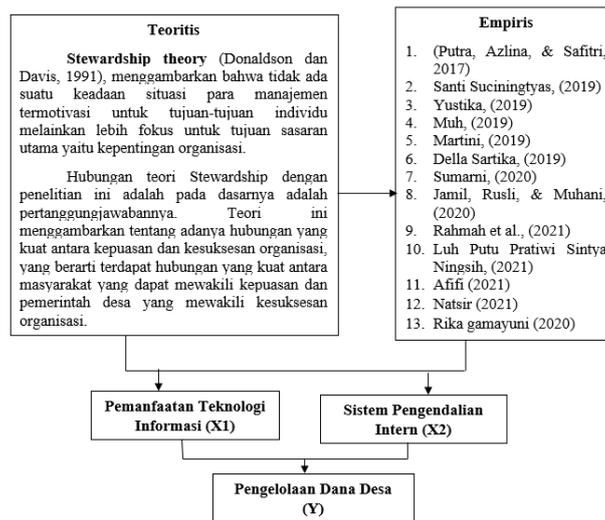
- 1) Sarana informasi dan komunikasi, dan
  - 2) Manajeen sistem informasi.
- e) Pemantauan atau Monitoring

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu dan pengujian efektivitas. Sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern (Pitaloka et al., 2020).

Indikator yang dapat di ambil dari dimensi pemantauan atau yang sering di sebut dengan monitoring menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Pemantauan Berkelanjutan, dan
- 2) Evaluasi terpisah.

### Kerangka Berfikir Dan Hipotesis



**Gambar 2. Kerangka Berpikir**

Variabel yang diteliti diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X1) : Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Variabel Independen (X2) : Sistem Pengendalian Intern
3. Variabel Dependen (Y) : Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat disusun 3 hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- H2 : Sistem Pengendalian Intern diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern diduga berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Alokasi dana desa

### 3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang memandang fenomena/gejala yang dapat di klasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

#### a) Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo untuk jumlah per desanya terdapat 10-11 aparat desa yang dipekerjakan sesuai dengan jabatan masing-masing dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Jadi dikarenakan jumlah aparat desa yang ada di seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto kurang lebih ada 130-an orang, maka peneliti menggunakan kriteria yang akan dijadikan responden yaitu terdapat 4 orang untuk per desanya jadi dengan demikian jumlah keseluruhan yang jadika sebagai sampel pada penelitian ini adalah 52 orang.

Berikut ini kriteria responden yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini :

1. Kepala Desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun
2. Sekretaris
3. Bendahara, dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### b) Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono (2019). Data primer merupakan data utama yang akan penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari responden dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan yang tertulis yang membahas hal-hal terkait penelitian.

#### c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono, (2019) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti faktor-faktor yang akan diperkirakan dan mengetahui apa yang secara umum dapat diantisipasi dari responden. Kemudian untuk skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala *likert*. Menurut Sugiono, (2019) bahwa skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

#### d) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data diuji dengan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS *version* 16. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

##### 2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan teknik pengujian valid atau tidaknya suatu kuesioner. Validnya suatu kuesioner apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas adalah proses pengujian suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dan dikatakan reliabel atau dapat diandalkan apabila respons individu setelah beberapa waktu terhadap sebuah pertanyaan adalah konsisten atau stabil (Ghozali, 2018).

##### 3. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian asumsi klasik terdapat 3 alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data pengujian regresi selanjutnya.

- 1) Uji Normalitas Data Residual,
- 2) Uji Multikolinearitas, dan
- 3) Uji Heteroskedastisitas.

##### 4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian ini di uji dengan menggunakan analisis regresi berganda.

## 4. Hasil

### Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa variabel variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>), diperoleh nilai R-hitung lebih besar bila dibandingkan nilai R-tabel 0.2759. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) dapat dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui bahwa variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) diperoleh nilai reliabilitas lebih besar bila dibandingkan nilai cronbach's alpha 0.70 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) dapat dikatakan reliabel atau handal.

### Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas Data Residual

Uji normalitas data residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependent dan variabel independent memiliki nilai residual yang distribusi normal atau tidak. Model regresi yang layak adalah jika nilai residual berdistribusi data normal atau mendekati normal. Berikut ini tabel hasil pengujian Normalitas Residual dengan menggunakan uji *one-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Berdasarkan hasil output, pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus kolmogorov-smirnov Test, maka diperoleh nilai Exact.sig. (2-tailed) untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>), serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) adalah 0.930 lebih besar dari 0,05 (0.930 > 0,05) sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal.

#### b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Nilai yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance <0,10 atau nilai VIF > 10.

Dari hasil analisis bahwa nilai Tolerance untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>) yaitu sebesar 0.841 > 0.1 serta nilai VIF 1.188 < 10,00. Dan untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) memperoleh Nilai Tolerance sebesar 0.841 > 0.1 serta nilai VIF 1.188 < 10,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada masing-masing variabel Independen.

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut tabel hasil pengujian heteroskedastisitas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

#### a) Analisis Regresi Liner Berganda

Dari hasil analisis hasil analisis regresi tentang Unstandardized Coefficients (B), dapat dilihat nilai constant B sebesar 3.318, koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>1</sub>) sebesar 0,589 dan koefisien Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) sebesar 0,585. Dengan demikian dapat dilihat dalam persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini berikut :

$$Y = 3.318 + 0,589 X_1 + 0,585 X_2 + e$$

#### b) Uji Persial (Uji t)

**Tabel 1. Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.318	7.910		.420	.677
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.589	.108	.561	5.458	.000
Sistem Pengendalian Intern	.585	.186	.324	3.147	.003

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber : Data diolah 2021, SPSS Versi 16

Persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis uji t untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5.458 > t_{tabel}$  1.676 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
- 2) Hasil analisis uji t untuk variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3.147 > t_{tabel}$  1.676 dengan nilai signifikan sebesar  $0.003 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

**c) Uji Simultan (Uji f)**

**Tabel 2. Hasil Uji f**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3792.071	2	1896.035	31.714	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2929.531	49	59.786		
	Total	6721.601	51			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber : Data diolah 2022, SPSS Versi 16

Hasil perhitungan menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 24.584 dengan signifikansi 0,000. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$ . Dari tabel F diperoleh nilai  $F_{tabel}$  dengan  $db_1 = 2$  dan  $db_2 = 52 - 2 - 1 = 49$  sebesar 3,19. Dari tabel diatas diperoleh  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $31.714 > 3,19$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,000<sup>a</sup> lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

**d) Koefisien Determinasi (R Square)**

Analisis koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Jika dilihat dari tingkat hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) secara bersama-sama dengan Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Y) masuk dalam kategori kuat (erat) dengan besar korelasi 0,751 atau 75.1%, sedangkan nilai R square ( $R^2$ ) adalah 0,564 (56.4%) yang berarti bahwa sebesar 56.4% tingkat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) sedangkan sisanya 43.6% dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya. Dengan kata lain, besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) adalah 56.4%, sedangkan sisanya 43.6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi ini.

**5. Pembahasan**

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Hasil pengujian statistik telah menunjukkan dukungan hipotesis yang telah di bangun, di mana hipotesis dinyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang di ukur dengan tiga dimensi yaitu: Jaringan, Komputer, dan Informasi menyatakan bahwa seluruh dimensi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memperbaiki dan dapat mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di seluruh desa se-Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di seluruh desa se-Keceamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan hasil kontribusi yang sangat baik.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yustika, (2019), Rusli, (2020), Andika, (2021) dan Luh Putu Pratiwi Sintya Ningsih, (2021) yang menjelaskan Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan begitu semakin baik pemanfaatan teknologi informasinya maka dapat menghasilkan informasi yang lebih berkualitas juga.

**Pengaruh Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dimensi dari Sistem pengendalian Intern yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern yang juga memeiliki beberapa indikator di dalamnya mempunyai pengaruh yang sangat baik dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di seluruh desa se-Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karyadi, (2019), Sari, (2021), dan Afifi, (2021) yang juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di seluruh desa se-Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo". Hal sejalan dengan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian menurut menurut Muhammad Fadil, (2020) dan Eliana, Nurhayati, Gunawan, & Amin, (2021) keduanya mengatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang artinya semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin baik.

Setelah melakukan uji f kemudian untuk melihat besaran pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan Uji R Square yang kemudian menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Inter sebesar 56.4% sedangkan sisanya sebesar 43.6% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pengaruh secara simultan sebesar 56.4% tersebut termasuk dalam kategori berpengaruh kuat.

## **6. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) se-Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo sebesar 61,1%.
2. Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) berpengaruh positif dan signifikan se-Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo sebesar 27,5%.
3. Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 56.4% sedangkan sisanya sebesar 43.6% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pengaruh secara simultan sebesar 56.4% tersebut termasuk dalam kategori berpengaruh kuat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo lebih memanfaatkan Teknologi Informasi dengan menggunakan *hardware*, *software* dan *useware* dengan sebaik mungkin agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa.
2. Perlunya pemelihara serta pengoptimalan dari sistem pengendalian intern yang ada di seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo agar dapat sehingga mampu untuk memperbaiki Pengelolaan Alokasi Dana Desanya.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan hasil uji determinasi dalam penelitian ini, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern mampu menjelaskan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,501 atau sebesar 50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dapat di jelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Maka dari itu kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini agar dapat menguji varibel lain yang dapat mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

## **Daftar Pustaka**

- Afifi, Z. (2021). *The Effect of Internal Control System and Village Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability. Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal*, 5(3), 1120–1124. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Andika, I. B. A. Y. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi

- Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Kerambitan). *Akuntansi Dan Keuangan*, 139–151.
- LAN dan BPKP. (2002). *Akuntabilitas dan Good Governance*. In Modul 1. Akip. Jakarta.
- Burhanuddin. (2021). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020. 03(01), 43– 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>
- Eliana, E., Nurhayati, N., Gunawan, E., & Amin, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 23– 31. <https://doi.org/10.22373/jimebi.s.v2i1.193>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Cet. IX)*. Semarang.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(No.2), 33–46.
- Koisin, E., & Melania Lalamafu, F. (2021). Sistem Komputer Dalam Pelaporan Penggunaan Dana Desa. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 89– 96. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i2.22>
- Kusuma, A. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas ( Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman ). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1–23.
- Luh Putu Pratiwi Sintya Ningsih. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud). *Akuntansi Dan Keuangan*, (2010), 386–405.
- Muhammad Fadil. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal).
- Natsir, M. (2021). *The Influence of Understanding of Financial Management Apparatus, the Utilization of Information Technology and Internal Control System on the Accountability of Village Fund Management in Aceh Singkil District, Province of Aceh, Indonesia*. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 04(06), 198–208. <https://doi.org/10.35409/ijbmer.2021.3334>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. (2020). 3.
- Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020. (2020). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 53(9), 1689–1699.
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A., Motohar, & Kabib. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif “COSO” Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Bsnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 01(08), 1–11.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Putra, R., Azlina, N., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Komitmen Manajemen terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ben. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1037–1050.
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis Pengellaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidangkasih Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(11), 1–13.
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Agnesia, R. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa ( Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur ). *Jurnal Integritas*, 1(2), 29– 56. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/198>
- Rika Gamayuni, R. (2020). *Accounting information technology and village finance management in Indonesia*. *Journal of Administrative and Business Studies*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.20474/jabs-6.1.1>
- Rusli, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu). *Ekonomi Dan Bisnis*, 12.
- Salle, A. (2019). Dana Desa. Retrieved from [https://drive.google.com/open?id=1\\_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUCn-0NQ0hbL](https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUCn-0NQ0hbL)

- Sari, N. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh). *Jurnal Iliah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 142–149.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed.; Setiawami, Ed.). Retrieved from [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Sujarweni, V. W. (2016). Sistem Akuntansi. *Sistem Akuntansi*, 19, 323–340.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Utami, N. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survei pada Unit Akuntansi Keuangan pada Bank BUMN di Kota Bandung) (Universitas Komputer Indonesia Bandung). Retrieved from <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3692>
- Yustika, R. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Kompetensi Perangkat Desa. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi*.